



Pengembangan UMKM: Memperkuat Efektivitas Kebijakan Moneter Dan Bauran Kebijakan BI untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah

M. Rosi¹, M. Awwibi Maulana²

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68136
Email : m.rosi0987@gmail.com, Awwibimaulana1@gmail.com

Abstrak

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) memiliki dampak signifikan terhadap UMKM, melalui pengaturan suku bunga, ketersediaan kredit, nilai tukar mata uang, inflasi, dan likuiditas pasar. Bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah mencakup berbagai instrumen, termasuk kebijakan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, operasi pasar terbuka, kebijakan makroprudensial, pengelolaan cadangan devisa, kebijakan moneter non-konvensional, dan kerjasama internasional. Melalui implementasi kebijakan tersebut, BI berupaya memperkuat efektivitas kebijakan moneter, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan akses keuangan serta kapasitas manajerial UMKM.

Kata Kunci : UMKM, Kebijakan Moneter dan Nilai Rupiah

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang sebagian besar dari output ekonomi, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Meskipun begitu, sektor ini terus menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi pertumbuhan dan keberlanjutannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi akses terbatas terhadap modal, keterbatasan dalam mengadopsi teknologi modern, kesulitan mengakses pasar, serta kerentanan terhadap fluktuasi nilai mata uang. Dan UMKM memiliki peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penopang utama pembangunan sosial dan pengurang disparitas ekonomi. Namun, seiring dengan manfaat yang dibawa oleh sektor UMKM, tantangan juga muncul, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.

Ditahun 2023 Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hampir 61 persen dan menyerap sebanyak 97 persen tenaga Kerja. Namun hal yang harus diwaspadai adalah pernyataan yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2022 yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global terus melambat dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Bank Dunia juga menyebut bahwa pertumbuhan global melambat dari 5,7% pada 2021 menjadi hanya 2,3% di 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya harus mampu disikapi dengan baik oleh pemerintah dalam Upaya melindungi Industri UMKM yang ada di Indonesia. Upaya melindungi dan mempercepat pertumbuhan UMKM dapat dilakukan dengan penyaluran modal, memberikan akses pelatihan bisnis, manajemen, dan kebijakan moneter lainnya (BPS Indonesia, 2021).

Dalam upaya untuk memperkuat sektor UMKM, kebijakan moneter dan campuran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat penting. Kebijakan moneter, yang mencakup pengaturan suku bunga, likuiditas, dan operasi pasar terbuka, dapat mempengaruhi ketersediaan dana dan biaya pinjaman bagi UMKM. Di sisi lain, bauran kebijakan BI, yang meliputi regulasi, supervisi, dan pengawasan perbankan, dapat membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Namun, untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah yang berkelanjutan, diperlukan efektivitas yang lebih besar dalam implementasi kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI yang mendukung pengembangan UMKM. Dalam konteks ini, penelitian dan analisis yang mendalam tentang hubungan antara kebijakan moneter, bauran kebijakan BI, dan pengembangan UMKM menjadi sangat penting.

Pada saat yang sama, stabilitas nilai Rupiah merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing UMKM, biaya impor, serta stabilitas harga di pasar domestik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI tidak hanya penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah.

Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam tentang hubungan antara kebijakan moneter, bauran kebijakan BI, dan pengembangan UMKM menjadi semakin penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme transmisi kebijakan dan dampaknya terhadap sektor UMKM, pembuat kebijakan dapat merancang langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.

Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam melakukan studi literatur menurut panduan yang Anda sebutkan:

1. **Pemilihan Topik:** Tahapan awal dalam melakukan studi literatur adalah memilih topik penelitian yang spesifik dan relevan dengan kepentingan peneliti. Topik ini akan menjadi fokus dari pencarian literatur.
2. **Pencarian Literatur:** Peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan berbagai sumber informasi seperti basis data jurnal ilmiah, perpustakaan online, situs web akademik, dan sumber-sumber lain yang terpercaya. Kata kunci yang relevan digunakan untuk memperoleh literatur yang sesuai dengan topik penelitian.
3. **Seleksi Literatur:** Setelah melakukan pencarian, peneliti kemudian melakukan seleksi literatur yang paling relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman terhadap topik yang diteliti.
4. **Pengumpulan dan Analisis Data:** Setelah literatur dipilih, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur tersebut. Hal ini meliputi rangkuman isi dari setiap literatur yang relevan, identifikasi temuan-temuan penting, serta pemahaman terhadap perbedaan dan kesamaan pendapat di antara para penulis.
5. **Penulisan Laporan:** Tahapan terakhir adalah menuliskan laporan atau paper berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari studi literatur tersebut. Laporan ini mencakup pengenalan topik, metode pencarian literatur, temuan-temuan penting, analisis, dan kesimpulan yang diambil dari studi literatur tersebut.

Studi literatur dapat menjadi pendekatan yang sangat berguna dalam penelitian, terutama sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian sebelum melakukan penelitian primer atau eksperimen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

1. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut sumber daya manusia merupakan subyek yang memiliki peran penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

UMKM memiliki beberapa keunggulan terhadap usaha besar diantaranya yaitu sebagai berikut (Partomo & Soejoedono, 2004):

1. Inovasi bidang teknologi mampu memudahkan produsen dalam proses produksi serta dalam perkembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta mampu RY menyerap tenaga kerja lebih banyak.
4. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri pada kondisi pasar dinamis dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

Pengaruh Kebijakan Moneter BI terhadap UMKM

Kebijakan moneter bank sentral adalah strategi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan suku bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan-tujuan seperti menjaga stabilitas nilai tukar, menurunkan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat terdampak oleh kebijakan moneter bank sentral. Bank Indonesia bertujuan untuk berkontribusi

sebanyak mungkin melalui strategi pengembangan UMKM dengan memperluas akses keuangan, meningkatkan manajemen sumber daya manusia, dan mendorong inovasi.

Dengan tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, salah satu tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Bank Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan integrasi informasi bisnis (BI), yang meningkatkan koordinasi kebijakan dengan memadukan kebijakan fiskal BI dengan kebijakan pemerintah dan reformasi struktural.

Di sisi lain, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) adalah kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan banyak lapangan kerja, UMKM memiliki dampak yang cukup besar terhadap pemulihan ekonomi bangsa. Kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank sentral, terutama Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter di Indonesia, adalah salah satu variabel yang mempengaruhi UMKM. Berikut ini adalah dampak dari kebijakan moneter tersebut terhadap UMKM:

a. Tingkat Suku Bunga

Pengaturan tingkat suku bunga adalah bagian penting dari kebijakan moneter. Tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank BI memengaruhi biaya pinjaman bagi UMKM. Suku bunga yang rendah cenderung membuat lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan pinjaman murah. Sebaliknya tingkat suku bunga yang tinggi, dapat mencegah investasi, pertumbuhan bisnis, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor UMKM.

b. Ketersediaan Kredit

Selain tingkat suku bunga ketersediaan kredit bagi UMKM sangat penting. Kebijakan kredit bank komersial dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral. Ketika bank sentral meningkatkan likuiditas sistem perbankan, UMKM akan lebih mudah mendapatkan pinjaman. Sebaliknya, jika terdapat restriksi kredit yang ketat, UMKM dapat mengalami kesulitan mendapatkan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.

c. Nilai Tukar Mata Uang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berdagang secara internasional sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang global. Produk UMKM dapat menjadi lebih kompetitif di pasar global jika mata uang lokal terdepresiasi, sementara mata uang yang menguat dapat menghambat daya saing mereka.

d. Inflasi

Kebijakan moneter yang buruk dapat menyebabkan inflasi yang tinggi, yang berdampak negatif pada UMKM. Inflasi yang tinggi meningkatkan biaya bahan baku dan operasional, sehingga mengurangi profitabilitas UMKM. Kebijakan moneter yang bijak harus mengendalikan inflasi tanpa menghentikan pertumbuhan UMKM.

e. Likuiditas Pasar

Kemampuan pasar untuk memudahkan penjualan aset dengan cepat tanpa mengurangi harganya secara signifikan dikenal sebagai likuiditas pasar. Kebijakan moneter yang mempengaruhi likuiditas pasar juga mempengaruhi UMKM. Peningkatan likuiditas dapat mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman, yang akan menguntungkan UMKM. Sebaliknya, kurangnya likuiditas dapat menghambat UMKM untuk mendapatkan kredit.

Dapat disimpulkan bahwa, UMKM terkena dampak signifikan dari kebijakan moneter yang diberlakukan oleh BI. Sangat penting bagi pemilik UMKM untuk memahami kebijakan-kebijakan ini secara menyeluruh karena hal ini akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan moneter yang hati-hati dan seimbang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan diuntungkan. Oleh karena itu, dampak kebijakan moneter terhadap UMKM harus terus dipantau dan dinilai.

Bauran Kebijakan BI untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah

Bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah melibatkan berbagai instrumen kebijakan moneter, makroprudensial, serta kebijakan di sektor keuangan lainnya. Berikut adalah beberapa komponen utama dari bauran kebijakan tersebut:

1. Kebijakan Suku Bunga

BI menggunakan suku bunga acuan, yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate, sebagai instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Dengan menyesuaikan suku bunga, BI dapat mempengaruhi permintaan agregat dan arus modal masuk atau keluar dari Indonesia.

2. Intervensi di Pasar Valuta Asing

BI aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengurangi volatilitas nilai tukar Rupiah. Intervensi ini dapat berupa jual beli valuta asing untuk menstabilkan kurs Rupiah terhadap mata uang asing.

3. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

BI melaksanakan OPT untuk mengelola likuiditas di pasar uang. Instrumen yang digunakan termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar.

4. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Instrumen yang digunakan meliputi pengaturan rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit perumahan, Countercyclical Capital Buffer (CCB), dan pengaturan likuiditas perbankan.

5. Pengelolaan Cadangan Devisa

Cadangan devisa yang cukup dan dikelola dengan baik menjadi buffer penting untuk menstabilkan Rupiah. BI berusaha menjaga cadangan devisa dalam jumlah yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian global.

6. Kebijakan Moneter Non-Konvensional

Dalam kondisi krisis atau ketidakpastian ekonomi yang tinggi, BI dapat menggunakan kebijakan moneter non-konvensional seperti pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) untuk memastikan likuiditas tetap tersedia di sistem perbankan.

7. Kerjasama Internasional

BI juga bekerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional untuk menjaga stabilitas keuangan. Ini termasuk swap agreement dengan bank sentral lain untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar.

Sebagai salah satu upaya pelaksanaan amanat kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan, BI juga memiliki peran dalam pengembangan UMKM. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama BI terkait UMKM adalah akses keuangan.

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit. Menyikapi kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan. Selain itu, pengembangan UMKM BI bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM.

Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia diimplementasikan sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan BI untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah.
2. Memperkuat sinergi bauran kebijakan BI dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah dalam mengelola defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Memperkuat kebijakan dan pengawasan makroprudensial untuk ikut memelihara SSK.
4. Memperkuat kebijakan BI dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan OJK untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital.
5. Menjelaskan kebijakan BI yang bersinergi dengan pihak lain untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.
6. Memperkuat kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan BI dan Republik Indonesia Penyusunan peta jalan UMKM yang disusun oleh Bank Indonesia meliputi 4 tahapan yakni, potensi UMKM, kesuksesan UMKM/link to market and finance, UMKM go digital, serta UMKM go ekspor.

Sementara itu, ruang lingkup pengembangan produk UMKM meliputi pengembangan produk volatil food, pengembangan ekonomi lokal serta Wirausaha Bank Indonesia (WUBI). Pada aspek perbaikan akses, pengembangan didorong dari akses finansial, pasar, jaringan pengetahuan, serta inovasi dan digitalisasi. Dukungan dari infrastruktur dan kelembagaan turut memberikan dampak bagi pembentukan ekosistem UMKM yang optimal, antara lain melalui dukungan regulasi/kebijakan, keuangan inklusif, perlindungan konsumen, edukasi/literasi, model bisnis, pemantauan, dan evaluasi serta penguatan kelembagaan dan sistem informasi.

Selain beberapa aspek tersebut, penguatan korporatisasi, penyempurnaan akurasi informasi dan data, optimalisasi koordinasi yang mengintensifkan antar kementerian/lembaga, peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta menciptakan ekosistem yang mendukung, merupakan bagian dari faktor pendorong keberhasilan pengembangan UMKM di Indonesia yang akan terus dibangun oleh Bank Indonesia.

KESIMPULAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fokus utama berbagai pihak di Indonesia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam pengembangan UMKM, dengan peningkatan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan sebagai prioritas. Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) berperan signifikan dalam memengaruhi UMKM melalui aspek seperti suku bunga, ketersediaan kredit, nilai tukar mata uang, inflasi, dan likuiditas pasar. Bauran kebijakan BI untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah melibatkan berbagai instrumen, termasuk kebijakan suku

bunga, intervensi pasar valuta asing, operasi pasar terbuka, kebijakan makroprudensial, pengelolaan cadangan devisa, kebijakan moneter non-konvensional, dan kerjasama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019. Jakarta: Bank Indonesia.
- BPS Indonesia. (2021). Buku Statistik Indonesia Tahun 2022. Statistik Indonesia 2021,1101001.
- Bank Indonesia. (2022). Kebijakan Moneter Bank Indonesia. (<https://www.bi.go.id/id/moneter/kebijakan/Contents/Default.aspx>).
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Kebijakan Moneter Triwulanan. (<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/Contents/Default.aspx>).
- Bank Indonesia. (2020). Stabilitas Sistem Keuangan. (<https://www.bi.go.id/id/stabilitas-sistem-keuangan/Contents/Default.aspx>).
- Kuncoro, M. (2018). Ekonomi Mikro: Teori Pengantar. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahendra, A. R., & Asnawi, R. (2019). The Effect of Bank Indonesia's Policy Rate on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Loans in Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(4), 315-329.
- Tandelilin, E., & Fahmi, I. (2015). Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-kasus. Yogyakarta: Kanisius.
- Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan penyusunan studi literatur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1-9.
- Partomo, T. S., & Soejoedono, A. R. (2004). Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.